

PENDEKATAN *FRAMEWORK* STOPE UNTUK KESIAPAN PENGALIHAN PBB PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Hari Susanto¹⁾, Adhi Susanto²⁾, Wing Wahyu Winarno³⁾

^{1),2),3)} Program Magister teknologi Informasi, Jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, UGM Yogyakarta
Jl Grafika No.2, Yogyakarta, 55281

Email : hari.cio.8a@mail.ugm.ac.id¹⁾, adhisusanto@jmn.net.id²⁾, maswing@gmail.com³⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan (*readiness*) pemerintah daerah dalam menerima pengalihan PBB dengan menggunakan pendekatan *framework* STOPE (*strategy, technology, organization, people, environment*) dengan menganalisis 5 domain utama, 15 sub-domain (isu), dan 59 sub-sub-domain (*factor*).

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran secara utuh mengenai pokok permasalahan yang terjadi terutama dari dukungan sisi infrastruktur TIK dengan menggunakan *framework* STOPE serta sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan langkah antisipatif jika diperlukan.

Hasil akhir dari penelitian ini, akan menganalisis tingkat kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan skala 4 titik yang dikeluarkan oleh Centre for International Development /CID (Harvard Cyber Law) Hasil analisis data menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Gunungkidul berada pada peringkat 3 (*siap*) pada skala 4 untuk menerima pengalihan PBB. Dari kelima domain, domain *strategy* dan *organization* berada pada peringkat 4 (*sangat siap*) untuk pengalihan PBB. Sedangkan domain *technology, people, dan environment* berada pada peringkat 3 (*siap*) pada skala 4 untuk pengalihan PBB.

Kata kunci: pengalihan, PBB, kesiapan, TIK, SDM, *e-government, readiness, CID, Framework* STOPE, domain, sub-domain, sub-sub-domain

1. Pendahuluan

Telah terjadi perubahan paradigma dalam pemerintah daerah yang semula lebih berorientasi sentralistik menjadi desentralistik dan menjalankan otonomi seluas-luasnya setelah diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Salah satu aspek penting kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yakni meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik [1].

Menurut (Indrajit,2001), untuk meningkatkan kualitas layanan kepada publik, organisasi pemerintahan daerah perlu mengoptimalkan implementasi *e-government* [2].

E-government sendiri telah menjadi isu nyata di era dengan teknologi *digital* (internet) sejak 1996 [3].

Pengertian *e-government* pada umumnya mengacu pada penggunaan TIK oleh pemerintah (seperti LAN, WAN, internet, intranet, dan *mobile computing*) dalam rangka pertukaran informasi dan penyediaan layanan kepada warga, bisnis/swasta dan publik secara umum, serta pihak-pihak lainnya [4]. *E-government* memiliki kemampuan untuk mentransformasi hubungan antara warga, swasta dan pemerintah lainnya [2].

Menurut (Wijaya dan Surendro, 2006), transformasi bentuk layanan pemerintah menuju *e-government* memerlukan kondisi atau keadaan tertentu (*pre-condition*) yang mendukung terwujudnya capaian *e-government* tersebut. *Pre-condition* ini dapat diartikan sebagai kesiapan (*readiness*) dan perlu diukur baik dari sisi penyedia maupun pengguna layanan untuk mengetahui peluang keberhasilan implementasi *e-government* pada organisasi pemerintah terkait [5].

Dari sekian banyak penelitian yang telah dilakukan, para peneliti menggunakan metode dan pendekatan penilaian kesiapan yang berbeda-beda sesuai dengan objek yang diteliti dan tujuan yang ingin dicapai. Peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang kesiapan perlu cermat dalam memilih metode yang tepat untuk penelitiannya, sesuai dengan objek penelitian dan target hasil yang diinginkan. Dengan ketepatan metode yang digunakan, hasil penelitian benar-benar akan menggambarkan kesiapan objek yang diteliti dan membuahkan rekomendasi yang tepat bagi pengembangannya. Namun demikian, kesiapan tersebut idealnya diukur secara berkala agar dapat diketahui kelemahan sekaligus solusi untuk membenahinya [6].

Salah satu bentuk otonomi daerah dan wujud tekad pemerintah daerah dalam mengimplementasikan *e-government* adalah penerimaan pengalihan PBB (Pajak Bumi, dan Bangunan) dari pusat ke daerah. Karena mulai per 1 Januari 2014, PBB P2 (sektor perdesaan dan perkotaan) menjadi wewenang pemerintah daerah, pemerintah pusat tidak akan melakukan campur tangan lagi. Untuk itu, keberhasilan dalam melakukan penerimaan pengalihan PBB sangat ditentukan oleh kesiapan pemerintah daerah, baik itu strategi, infrastruktur, SDM, maupun organisasinya.

Penelitian untuk menganalisis kesiapan pemerintah daerah dalam menerima pengalihan PBB ini penting dilakukan, karena selain dalam rangka meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), juga meningkatkan pelayanan publik secara maksimal. Penelitian ini dilakukan di pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul karena merupakan salah satu pemerintah daerah yang belum mengimplementasikan PBB secara mandiri di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan framework STOPE (*strategy, technology, organization, people, and environment*), dengan menganalisis 5 domain utama, 15 sub-domain (isu), dan 59 sub-sub-domain (faktor).

Framework STOPE dipilih karena memiliki domain-domain yang merupakan integrasi dari berbagai faktor yang pernah dipakai pada berbagai penelitian untuk mengukur kesiapan [7]. Framework tersebut juga telah dikembangkan dan dipakai untuk mengevaluasi berbagai permasalahan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti perencanaan e-government dan e-business ([8], [9]) maupun manajemen keamanan informasi [10]. Bahkan menurut Al-Oshaimi dkk (2006), framework STOPE memiliki pengembangan model analisa matematis yang memungkinkan dilakukan penilaian e-readiness dan perbandingan tingkat pengaruhnya terhadap nilai e-readiness sekaligus pada tiga level yang berbeda (domain, sub-domain, dan sub-sub-domain) [11].

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dirumuskan adalah bagaimanakah tingkat kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dalam menerima pengalihan PBB menggunakan pendekatan framework STOPE?

1.2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan bagaimana menggunakan pendekatan Framework STOPE untuk kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dalam proses pengalihan PBB. Beberapa isu utama yang menjadi tujuan peneliti yaitu:

- 1) Menganalisis tingkat kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dalam proses pengalihan PBB
- 2) Menggunakan pendekatan framework STOPE untuk mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam menerima pengalihan PBB
- 3) Mengidentifikasi pengaruh domain-domain pada framework STOPE terhadap implementasi pengalihan PBB.

1.3 Metodologi Penelitian

A. Bahan dan Alat

Bahan penelitian yang dipakai pada penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer berupa hasil isian kuesioner dengan responden yang dipilih dengan kriteria tertentu. Data

tersebut akan dipakai sebagai data utama untuk analisis kesiapan pengalihan PBB.

2. Data sekunder berupa literatur dan dokumen legal formal yang berkaitan dengan e-government dan proses pengalihan PBB dari pemerintah pusat ke daerah khususnya di Kabupaten Gunungkidul. Data sekunder ini berfungsi sebagai data pendukung.

Responden dalam penelitian ini adalah PNS Kabupaten Gunungkidul di DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah) dan beberapa PNS yang terlibat dalam tim khusus pengalihan PBB.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti dijelaskan berikut ini.

1. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang diadopsi dari instrumen yang dikembangkan oleh Al-Oshaimi [7].
2. Sebuah laptop dengan spesifikasi yang cukup untuk melakukan analisis statistik menggunakan perangkat lunak MS Excel pada sistem operasi Windows 8.

B. Cara Penelitian

Cara penelitian ini meliputi tahapan pemodifikasian alat analisis kesiapan PBB, penyusunan indikator kesiapan, penyusunan instrumen penelitian, survei dan pengumpulan data lapangan, analisis dan pengolahan data, serta penilaian dan pemeringkatan kesiapan pengalihan PBB.

1) Modifikasi Framework STOPE untuk Kesiapan PBB

Framework STOPE dimodifikasi terutama pada bagian sub-domain/isu dan sub-sub-domain/faktor sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. Beberapa item dimodifikasi/dieliminsi karena tidak sesuai dengan kondisi lapangan di pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

2) Penyusunan Indikator Kesiapan PBB

Setelah dimodifikasi/dieliminsi item-item yang tidak sesuai, masing-masing domain (pada level faktor) diberikan indikator kesiapan pelaksanaan pemungutan PBB. Masing-masing indikator merupakan gambaran tingkat kesiapan pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menerima pengalihan PBB.

3) Penyusunan Instrumen Pengambilan Data

Penyusunan instrumen pengambilan data berupa kuesioner mengacu pada indikator yang telah disusun pada langkah sebelumnya. Kuesioner ditujukan untuk mendapatkan nilai *importance* (pembobotan) sub-sub-domain, sub-domain, dan domain; serta *measure* (analisis) sub-sub-domain berdasarkan framework STOPE. Kuesioner pada penelitian ini akan dibagi menjadi dua kelompok, kuesioner fakta dan kuesioner persepsi. Kuesioner fakta bertujuan menggali informasi tentang keadaan sesungguhnya kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul untuk pengalihan PBB. Sedangkan kuesioner persepsi bertujuan untuk mengetahui persepsi responden terhadap tingkat kepentingan (*importance*) item pertanyaan. Kuesioner akan dibuat untuk masing-masing level, domain utama, sub-domain, dan sub-sub-domain.

- a. Instrumen level domain utama berisi satu jenis penilaian, yakni importance of domains/pembobotan domain (kuesioner I).
- b. Instrumen level sub-domain berisi satu jenis penilaian, yakni importance of issues/pembobotan isu (kuesioner II).
- c. Instrumen level sub-sub-domain berisi dua jenis penilaian, yakni analisis faktor (*measure/M*) dan importance of factors/pembobotan faktor (kuesioner III).

4) Survei dan Pengumpulan Data

Survei dan pengumpulan data dilakukan di lokasi objek penelitian menggunakan instrumen yang telah disusun. Hasilnya berupa data mentah jawaban kuesioner oleh para responden penelitian.

5) Analisa dan Pengolahan Data

Analisa dan pengolahan data dijadikan landasan untuk memberikan penilaian dan pemeringkatan kesiapan PBB pada objek penelitian. Nilai importance (pembobotan) dan measure (evaluasi) diolah menggunakan persamaan matematis yang telah tersedia pada framework STOPE untuk menghasilkan nilai kesiapan PBB *sub-sub-domain*, *sub-domain*, *domain*, dan organisasi pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Nilai kesiapan tersebut dipakai untuk melakukan pemeringkatan kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dalam pengalihan PBB.

6) Penilaian dan Pemeringkatan Kesiapan PBB

Pemeringkatan kesiapan PBB dilakukan dengan mengacu pada pemeringkatan *readiness* skala 4 titik yang dikeluarkan oleh Centre for International Development/CID (Harvard Cyber Law). Skala terendah adalah 1 yang menggambarkan kondisi belum siap (not ready), skala 2 menggambarkan kondisi cukup siap (almost ready), skala 3 menggambarkan kondisi siap (ready), dan skala tertinggi adalah 4 yang menggambarkan kondisi sangat siap (completely ready) objek yang dinilai. Pemeringkatan dilakukan pada level sub-domain, domain, dan framework STOPE. Nilai pemeringkatan pada level framework merupakan nilai kesiapan pemerintah kabupaten Gunungkidul dalam pengalihan PBB.

1.4 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai kesiapan (*readiness*) telah dilakukan oleh berbagai peneliti. Berbagai peneliti telah melakukan analisis kesiapan di sektor pemerintahan dengan berbagai metode dan pendekatan, karena kesiapan (*readiness*) sangat menentukan kesuksesan implementasi *e-government* dan pencapaian sasarannya. Salah satunya adalah Bui et. al. yang mengajukan sebuah *framework* untuk menganalisis *e-readiness* nasional suatu bangsa, dengan 8 faktor dan 52 kriteria pengukuran yang mereka sarikan dari berbagai metode terdahulu tentang pengukuran serupa [9].

Selanjutnya penelitian *readiness* telah dilakukan oleh (Wahyudi,2008) bertujuan untuk menelaah dan menilai bagaimana TIK telah digunakan para lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan layanan *DIY learning gateway*. Dalam penelitiannya Wahyudi

menggunakan model penilaian CID Harvard. Penelitiannya difokuskan pada tiga kategori yaitu *network access*, *networked learning*, dan *networked society*. Dalam penelitiannya didapatkan hasil bahwa level penilaian *e-readiness* belum ada yang mencapai stage (tingkat) 4 sebagai nilai tertinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan layanan *DIY learning gateway* di provinsi DIY masih "belum siap" untuk setiap kategori dan indikator model penelitian yang digunakan. [13]

Isu *readiness* ini tidak hanya mengacu pada pengukuran skala negara. Berbagai penelitian juga telah dilakukan untuk mengukur *readiness* level individu (SDM), seperti yang dilakukan oleh (So, 2005) terhadap guru-guru SD dan SMP di Hongkong. Penelitiannya yang menggunakan pendekatan model Chapnick bertujuan untuk mengukur sejauh mana *readiness* para guru terhadap implementasi *e-learning* di sekolah [14].

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Vosloo dkk, 2004), penelitian dilakukan untuk menilai *e-readiness* organisasi non-profit (NPO) yang ada di Western Cape, Afrika Selatan. Dalam melakukan penelitiannya, mereka menggunakan metode *real access to ICT* yang dikeluarkan oleh *bridge.org* untuk mengetahui hambatan terbesar dalam adopsi TIK dan sejauh mana lokasi geografis mempengaruhi tingkat *e-readiness* organisasi disana. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa lokasi geografis sangat berpengaruh pada tingkat akses terhadap TIK, bahkan menjadi hambatan terbesar dalam pengembangan TIK pada organisasi non-profit disana [15].

Penelitian oleh (Al-Oshaimi, 2007) dengan menggunakan pendekatan *framework* STOPE (*strategy, technology, organization, people, and environment*) dalam penelitiannya pada 3 bidang organisasi yang berbeda (pemerintahan, perbankan, dan swasta). Ia melakukan penilaian dengan menganalisis 5 domain, 17 sub-domain (isu), dan 146 sub-sub-domain (faktor) berdasarkan *framework* STOPE. Dari penelitian tersebut dapat diketahui tingkat *e-readiness* masing-masing organisasi yang diteliti serta kekuatan dan kelemahan setiap organisasi terkait dengan pemanfaatan TIK [7].

Dari sekian banyak penelitian yang telah dilakukan, para peneliti menggunakan metode dan pendekatan penilaian kesiapan (*readiness*) yang berbeda-beda sesuai dengan objek yang diteliti dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitiannya. Peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan (*readiness*) perlu cermat dalam memilih metode yang tepat untuk penelitiannya, sesuai dengan objek penelitian dan target hasil penelitian yang ingin dicapai. Dengan ketepatan metode yang digunakan, hasil penelitian benar-benar akan menggambarkan *readiness* objek yang diteliti dan menghasilkan masukan yang tepat bagi pengembangannya.

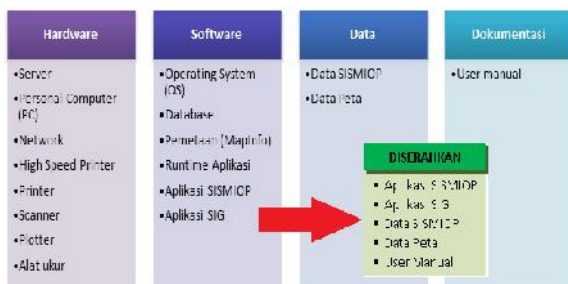
2. Pembahasan

A. Pengalihan PBB di Kabupaten Gunungkidul

Melihat rangkaian pengalihan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), pendaerahan PBB membutuhkan persiapan yang matang yaitu berupa penyusunan Peraturan daerah (Perda). Perda pemungutan PBB harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selain persiapan tentang Perda, pemerintah daerah juga harus menyiapkan:

1. Sumber Daya Manusia
2. Struktur organisasi dan tata kerja
3. Sarana dan prasarana
4. Pembukaan rekening penerimaan
5. Kerja sama dengan pihak-pihak terkait (notaris/PPAT, Bank Sehat, BPN, dll).

Berikut ini adalah sarana dan prasara yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah sebagai persiapan pengalihan PBB [17]:



Gambar 1. Kebutuhan Sarpras di Pemerintah Daerah

Untuk melakukan penerimaan pengalihan PBB tersebut diperlukan persiapan yang matang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul meliputi strategi, infrastruktur, peraturan, pembiayaan, dan personil. Infrastruktur yang harus dipersiapkan meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak merupakan sistem aplikasi yang selama ini telah dioperasikan oleh Direktorat Jederal Pajak dalam mengelola PBB.

Di bidang peraturan, harus dipersiapkan peraturan daerah yang berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan PBB, Kabupaten Gunungkidul sudah mempunyai Perda yang mengatur tentang PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan yaitu Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012.

Dan yang penting adalah kesiapan personil (SDM) yang menangani PBB, karena pada proses administrasi dan pengelolaan PBB P2 ini tentu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul harus menyiapkan personil yang bertugas sebagai pendata atau surveyor, penilai (valuer), *operator console* dan *operator data entry*, administrasi pemungutan, pemungut, penagih/juru sita, pendistribusi SPPT, dan lain-lain. Sampai saat ini

pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul sudah mempersiapkan SDM yang menguasai:

1. Sistem administrasi PBB (pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/pengalihan dan pelayanan),
2. Kebijakan/peraturan dan SOP pelayanan,
3. Peningkatan keahlian Sumber Daya Manusia (Aparatur) melalui pelatihan,
4. Sistem manajemen informasi objek pajak.

Selain kesiapan dari sisi sarana prasarana (infrastruktur TIK), peraturan yang berupa Perda dan SDM yang mumpuni, Struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul juga perlu dipersiapkan, dan pola tata kerja yang ada sudah disiapkan. Hal ini didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2011, adanya evaluasi kelembagaan, meenjadikan bidang pendapatan menjadi 2 bidang yaitu Bidang Pendapatan dan Pengembangan Pendapatan, serta Bidang Pelayanan dan Penagihan Pajak Daerah dalam rangka mendukung pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah.

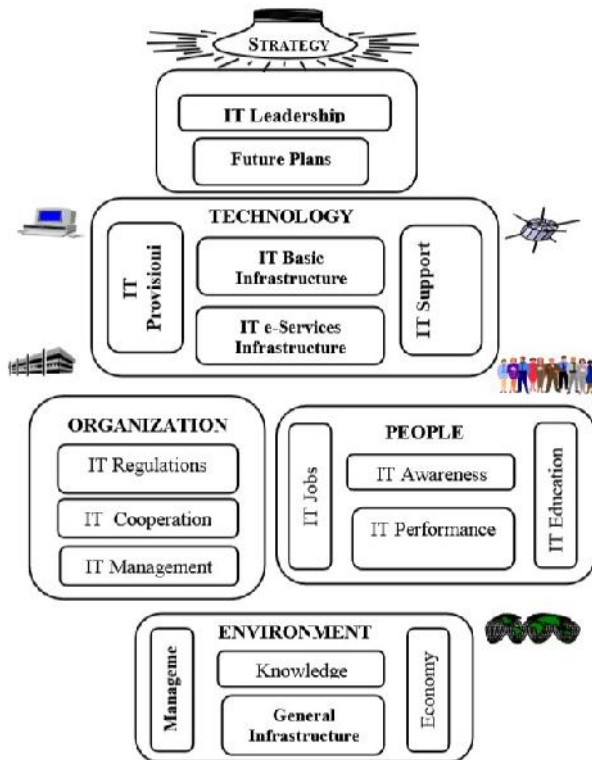
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas DPPKAD Kabupaten Gunungkidul, pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul juga sudah melakukan pembukaan rekening baru dalam rangka penerimaan PBB, selain itu juga sudah melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti Bank, notaris/PPAT, BPN, dan KPP Pratama Kabupaten Gunungkidul. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul berharap proses pengalihan PBB dapat berjalan lancar dan masyarakat menerima manfaat yang optimal dari pengalihan tersebut.

B. Pendekatan Framework STOPE

Banyak metode, pendekatan maupun *framework* yang dibuat dan diusulkan untuk menganalisis kesiapan. Salah satunya adalah pendekatan *framework* STOPE yang akan digunakan pada penelitian ini. Kerangka STOPE (*strategy, technology, organization, people, and environment*) merupakan pengembangan dari metode *Linstone* yang meneliti perkembangan teknologi di masyarakat dengan memperhatikan tiga *domain* utama, *technology*: “T”, *institutions* atau *organizations*: “O”, dan *individuals* atau *people*: “P”. Bakry yang merupakan penggagas *framework* STOPE menambahkan dua item, yaitu *strategy*: “S” dan *environment*: “E”, sehingga menjadi “STOPE” (Al-Oshaimi, 2007).

STOPE terbagi menjadi tiga level, *domain*, *sub-domain* (isu) dan *sub-sub-domain* (faktor) yang memungkinkan penilain secara terpisah maupun integral antar level. Level isu dan faktor pada kerangka tersebut merupakan peleburan dari sepuluh metode penilaian *e-readiness* yang ada sebelumnya sehingga menghasilkan metode pengukuran yang lengkap dan integral.

Metode ini juga lebih fleksibel dalam pemilihan dan penggunaan item-nya. Penggunaan item khususnya pada level isu dan faktor dapat disesuaikan dengan kebutuhan objek penelitian. Hal tersebut membuat metode penilaian dengan pendekatan *framework* STOPE lebih fleksibel, serta dapat digunakan untuk menilai *readiness* skala negara maupun organisasi. Untuk skala organisasi, *framework* STOPE dapat dipakai pada penilaian berbagai tipe organisasi, mulai pemerintah, swasta, perbankan, sampai institusi pendidikan (Al-Oshaimi, 2007).



Gambar 2. Framework STOPE [11]

C. Pemeringkatan Framework STOPE

Hasil pengolahan data yang ada digunakan untuk menilai dan melakukan pemeringkatan kesiapan pengalihan PBB pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Penilaian dilakukan dengan menggunakan bantuan grafik yang berbentuk radar untuk menampilkan kekuatan dan kelemahan *domain* dan *sub-domain* pada *Framework STOPE* yang juga merupakan kekuatan dan kelemahan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka menerima pengalihan PBB. Adapun pemeringkatannya dilakukan mulai dari level *sub-domain*, *domain*, dan *framework*.

Kemudian pemeringkatan kesiapan pengalihan PBB menggunakan skala 4 titik yang mengacu pada pemeringkatan *readiness* yang dikeluarkan oleh *Centre of International Development* (CID). Skala 1 adalah skala terendah yang menggambarkan kondisi belum siap (*not ready*), dengan rentang persentase 0%–25%. Skala 2

menggambarkan kondisi cukup siap (*almost ready*), dengan rentang persentase 25% – 50%. Skala 3 menggambarkan kondisi siap (*ready*), dengan rentang persentase 50% – 75%. Skala 4 adalah skala tertinggi yang menggambarkan kondisi sangat siap (*completely ready*), dengan rentang persentase 75% – 100 %.

D. Hasil Penelitian

Kuesioner disebarakan kepada 58 orang responden dalam bentuk *hardcopy*, dan kuesioner yang kembali adalah sejumlah 50 responden. Penyebaran kuesioner dilengkapi dengan wawancara untuk melengkapi dan mempertajam data hasil kuesioner. Wawancara yang mengacu pada butir-butir pertanyaan pada kuesioner dilaksanakan kepada beberapa orang pejabat, yaitu Kepala Dinas DPPKAD, Sekretaris Dinas DPPKAD, Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendapatan, dan Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan Pajak Daerah.

Tabel 1. Deskripsi Penyebaran Responden

Variabel	Pengukur	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	33	66%
	Perempuan	17	34%
Usia (dalam tahun)	23 s.d 30	5	10%
	31 s.d 40	12	24%
	41 s.d 50	17	34%
	>50tahun	16	32%
Pendidikan	D3	13	26%
	S1	28	56%
	S2	9	18%
	S3	0	0%
Masa kerja	0 s.d 2	2	4%
	2 s.d 5	10	20%
	5 s.d 10	18	36%
	>10tahun	20	40%
Frekuensi pemakaian komputer di kantor	0 s.d 2 jam	14	28%
	2 s.d 5 jam	26	52%
	>5jam	10	20%
Pernah ikut diklat/sosialisasi	Ya	20	40%
	Tidak	30	60%

Berdasarkan karakteristik responden yang tersaji pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

1. Dari 50 responden, ternyata sebagian besar responden adalah laki-laki sebanyak 33 responden (66%), sedangkan perempuan sebesar 34%.
2. Mayoritas responden berusia antara 41 s.d 50 tahun sebesar 34%. Jika dibuat klasifikasi berdasarkan (Morris dan Venkatesh, 2000) dimana usia 40 tahun ke bawah termasuk golongan muda dan di atas 40 tahun termasuk golongan tua maka sebanyak 33 responden (66%) termasuk golongan tua dan 17 responden (34%) masuk golongan muda [18].
3. Tingkat pendidikan responden lumayan tinggi, sebagian besar adalah S1 yaitu sebanyak 28 responden (56%) dan S2 sebanyak 9 orang (18%).

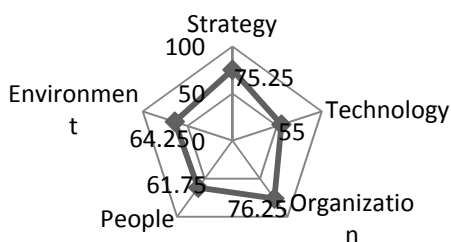
4. Paling banyak responden memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun yaitu sebanyak 20 responden (40%) dan disusul dengan masa kerja antara 5-10 tahun sebanyak 18 responden (36%).
5. Dari 50 responden ternyata frekuensi pemakaian komputer di kantor mayoritas berkisar antara 2-5 jam yaitu sebanyak 26 responden (52%). Sedangkan pemakaian komputer di kantor yang lebih dari 5 jam hanya berjumlah 10 responden (20%).
6. Mayoritas belum pernah mengikuti pelatihan/diklat mengenai pengalihan PBB yaitu sejumlah 30 responden (60%). Setelah ditelusuri lebih lanjut, ada beberapa catatan di kuesioner yang menuliskan belum pernah mengikuti pelatihan/diklat, tetapi hanya belajar dari *e-learning* dan buku tentang pengalihan PBB.

Penilaian dan Pemingkatan pada kelima domain untuk kesiapan pengalihan PBB di pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dapat diilustrasikan seperti pada Tabel 2 dan Gambar 2.

Tabel 2. Pemingkatan Kesiapan pada domain Utama

No	Sub-Domain	Persentase (%)	Ranking (Skala 4)	Ket
1	Strategy	75,25	4	sangat siap
2	Technology	55	3	siap
3	Organization	76,25	4	sangat siap
4	People	61,75	3	siap
5	Environment	64,25	3	siap
STOPE		66,5	3	siap

Dari Tabel 2, hanya dua domain yaitu domain strategy dan domain Organization yang memiliki nilai kesiapan pengalihan PBB 4 (sangat siap) pada skala 4. Sisanya domain Technology, People, dan Environment hanya memiliki nilai kesiapan PBB 3 (siap) pada skala 4.



Gambar 2. Grafik Radar Kesiapan PBB Level Domain

Dari Gambar 2 diketahui bahwa domain organization memiliki nilai tertinggi sebesar 76,25 %, disusul dengan domain strategy yaitu 75,25%, lalu domain environment, dan domain people. Domain technology memiliki nilai terendah sebesar 55%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki kekuatan utama pada sisi Domain Organization, kekuatan pendukung pada ketiga domain lainnya seperti Strategy, Environment, dan People. Sedangkan domain technology menjadi kelemahan, dan harus diperhatikan menjelang pelaksanaan pengalihan PBB per 1 Januari 2014.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengolahan data diketahui secara berurutan nilai *relative weight* (pembulatan ke atas) kelima domain pada framework STOPE secara berurutan dari besar ke kecil adalah domain organization dan technology masing-masing sebesar 0,21, kemudian domain strategy dan people sebesar 0,20 dan yang terkecil adalah domain environment sebesar 0,19. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa Domain Technology dan Organization memiliki pengaruh lebih besar, disusul oleh domain strategy dan people, serta Domain Environment yang mempunyai pengaruh paling kecil. Namun demikian, kelima domain utama ini tetap harus diperhatikan dan menjadi acuan dalam proses pengalihan PBB, tidak boleh mengabaikan salah satu domain karena bisa menjadi penghambat dalam proses pengalihan PBB.

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :

1. Pendekatan Framework STOPE yang digunakan untuk kesiapan pengalihan PBB adalah dengan menganalisis 5 domain, 15 sub-domain, dan 59 sub-sub-domain (faktor).
2. Dari kelima domain, domain Strategy dan Organization berada pada peringkat sangat siap (4) pada skala 4 untuk proses pengalihan PBB. Sedangkan dari sisi domain Technology, People, dan Environment hanya berada pada peringkat siap (3) pada skala 4 untuk pengalihan PBB.
3. Secara keseluruhan, pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul berada pada peringkat siap (3) pada skala 4 untuk penerimaan pengalihan PBB dari pemerintah pusat. Namun, ada beberapa hal yang harus dibenahi pada level sub-domain dan sub-sub-domain supaya peringkat kesiapan dapat ditingkatkan sampai pada peringkat sangat siap (4).

3.2 Saran

Saran bagi peneliti selanjutnya :

1. Melakukan penelitian tentang pengalihan PBB di pemerintah daerah lain yang belum mengimplementasikannya, bisa dengan menggunakan framework STOPE atau metode dan framework lain sehingga bisa dijadikan perbandingan dan memperkaya hasil penelitian mengenai kesiapan pengalihan PBB.
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan PBB sebagai pajak daerah, sejauh mana tingkat keberhasilannya jika dilihat dari tolok ukur peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
3. Melakukan penelitian dengan memfokuskan tema pada salah satu domain maupun sub-domain sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih detail dan lengkap. Misal salah satu tema penelitian yang dapat dipilih adalah tema tentang domain teknologi, dengan peningkatan ICT Awareness untuk kesiapan pengalihan PBB.

Daftar Pustaka

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
- [2] Indrajit R.E, *Electronic Government-Strategi Pembangunan dan Pelayanan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta, Indonesia: Andi, 2001.
- [3] C. 2003 Poter. A New Way of Governing in the Digital Age. The Evolving Internet (8:3).
- [4] Hakikur Rahman, "E-Government Readiness: From the Desain Tabel to the Grass Roots," *Paper pada ICEGOV*, vol. ACM 978-1-59593-822 -0/07/12, no. Macao, 2007.
- [5] Wijaya S.W and Surendro K, "Kajian Teoritis: Model E-Government Readiness Pemerintah Kabupaten/Kotamadya dan Keberhasilan E-Government," *Paper pada Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*, no. Yogyakarta, 2006.
- [6] Azab N.A., Kamel Sherif, and Dafoulas Georgios, "A Suggested Framework for Assessing Electronic Government Readiness in Egypt," *Electronic Journal of E-Government*, vol. 7, no. 1, pp. 11-28, 2009.
- [7] K.I.S Al-Oshaimi, "Mathematical Model for E-readiness Assessment of Organizations with Intranets," King Saud University, Saudi Arabia, Unpublished Magister Thesis 2007.
- [8] Bakry S.H, "E-Bu,siness Development: A Strategy," *Invited Paper. Proceedings of the International Conference on Communication, Computer & Power (ICCP'01)*, no. Maskate, Kesultanan Oman, pp. pp. I-17-I-24, 2001.
- [9] Bakry S.H, "Development of E-government: A STOPE View," *International Journal of Network Management*, vol. vol.14 No.5, no. pp. 339-350, 2004.
- [10] Bakry S.H, "Development of Security Policies for Private Networks," *International Journal of Network Management*, vol. vol. 13, pp. pp. 203-210, 2003.
- [11] K.I.S Al-Osaimi, Abdulmohsen Alherais, and S.H Bakry, "An Integrated STOPE Framework for E-readiness Assessment ," *Proceeding of 18 th National Computer Conference*, no. Saudi Arabia: Saudi Computer Society, 2006.
- [12] T.X Bui, Siva Sankaran, and I.M Sebastian, "A framework for Measuring National E-Readiness," *Int. J. Electronic Business*, vol. Vol. 1, No. 1, no. Honolulu: University of Hawaii, pp. pp.3-22.
- [13] Sugeng Wahyudi, "Penilaian E-readiness terhadap layanan learning gateway DIY," UGM, Yogyakarta, Tesis Tidak Terpublikasi 2008.
- [14] K.K.T So, "The E-Learning Readiness of Teachers in Hong Kong," *Proceedings of the Fifth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT'05)*, no. IEEE, 2005.
- [15] Steve Vosloo and J.P.Van Belle, "E-Government and the E-Readiness of Non-Profit Organisations in the Western Cape, South Africa," *Reviewed Paper*, no. Western Cape, South Africa, 2004.
- [16] Zulfiana Farista, "E-Readiness Assessment sebagai Langkah Awal Implementasi E-Government di Kabupaten Lombok Timur," UGM, Yogyakarta, Tesis Tidak Terpublikasi 2007.
- [17] Pajak.Org. (2012, Desember) Direktorat Jendral Pajak.[Online].<http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2013.
- [18] V. Venkatesh and M.G. Morris, "Why Don't Men Ever Stop to Ask For Direction?, Gender, Social Influence, and Their Role in Technology Acceptance and Usage Behavior," *MIS Quartely*, pp. 115-139, 2000.

Biodata Penulis

Hari Susanto, memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T), Jurusan Teknik Informatika Telkom University Bandung, lulus tahun 2008. Sedang menempuh pendidikan di Program Pasca Sarjana Magister Teknologi Informasi Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Saat ini menjadi PNS di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai Pranata Komputer.

Adhi Susanto, merupakan Guru Besar Emiritus Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Meyelesaikan gelar M.Sc. di UC Davis tahun 1966, dan memperoleh gelar Ph.D pada tahun 1986 di UC Davis. Minat/keahlian antara lain *Electronics Engineering, Image Processing, Signal Processing, Adaptive System, Classification, Pattern Recognition Techniques, and e-government*. Saat ini menjadi Dosen di Teknik Elektro UGM Yogyakarta.

Wing Wahyu Winarno, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 1987. Memperoleh gelar Master of Accountancy and Financial Information College of Business, Cleveland State University Ohio U.S.A, lulus tahun 1994.. Memperoleh gelar Doktor tahun 2011 di Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta. Saat ini menjadi Dosen di MTI UGM Yogyakarta, STIE YKPN.

